



PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN TAHUNAN

Ula Restu Rafifah, Dwi Ratmono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of corporate governance mechanisms like independent board of commissioners, board of commissioners who have the capability of accounting or business, board commissioners meetings, size board of commissioners, independent audit committee, audit committee who has the capability of accounting or business, audit committee meetings, quality auditor, and institutional ownership on voluntary disclosure. Profitability and firm size used as control variable. The population in this study are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010, 2011, 2012, and 2013. The sampling method in this research is purposive sampling. Sampled companies there are 43 companies with a total number of samples in this study were 172 data. Then, there are 12 samples that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of the sample are 160 data. Multiple regression used to be analysis technique. The results showed that, only board of commissioners meetings that have a significant influence on voluntary disclosure with the positive direction, which is consistent with the hypothesis, while other variables results show inconsistent with the hypothesis. Independent board of commissioners, independent audit committee, and audit committee who has the capability of accounting or business have significant influence on voluntary disclosure, but with a negative direction. Board of commissioners who have the capability of accounting or business, size of the board of commissioners, audit committee meetings, quality auditors, and institutional ownership has no influence on voluntary disclosure.

Keywords: Voluntary Disclosure, Corporate Governance Mechanisms, Agency Theory, Resource Dependency Theory

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam perkembangannya dalam dunia bisnis tidak selalu mengalami keuntungan terus menerus tetapi sejumlah perusahaan masih mengalami kegagalan bahkan kebangkrutan bisnis seperti Enron, World com dan Paramalat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dan kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan adalah kurangnya informasi perusahaan yang diungkapkan berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta lemahnya dalam sistem manajemen perusahaan. Ancaman-ancaman kegagalan dan kebangkrutan bisnis tersebut menekan komite tata kelola perusahaan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia untuk menyediakan informasi dalam sejumlah laporan dan menetapkan aturan-aturan yang dapat membantu dalam pemantauan dan pengawasan sistem manajemen perusahaan (Yaseen Al Janadi, *et al.*, 2013). Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi ancaman kegagalan dan kebangkrutan adalah menyediakan informasi tambahan yang memadai atau pengungkapan sukarela.

Menurut Darrough (1993) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang bebas dilakukan manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan tahunan. Dalam mewujudkan pengungkapan sukarela yang memadai untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan, peran manajemen sangat penting karena pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan diungkapkan oleh akuntan perusahaan dengan persetujuan manajemen puncak perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem mekanisme

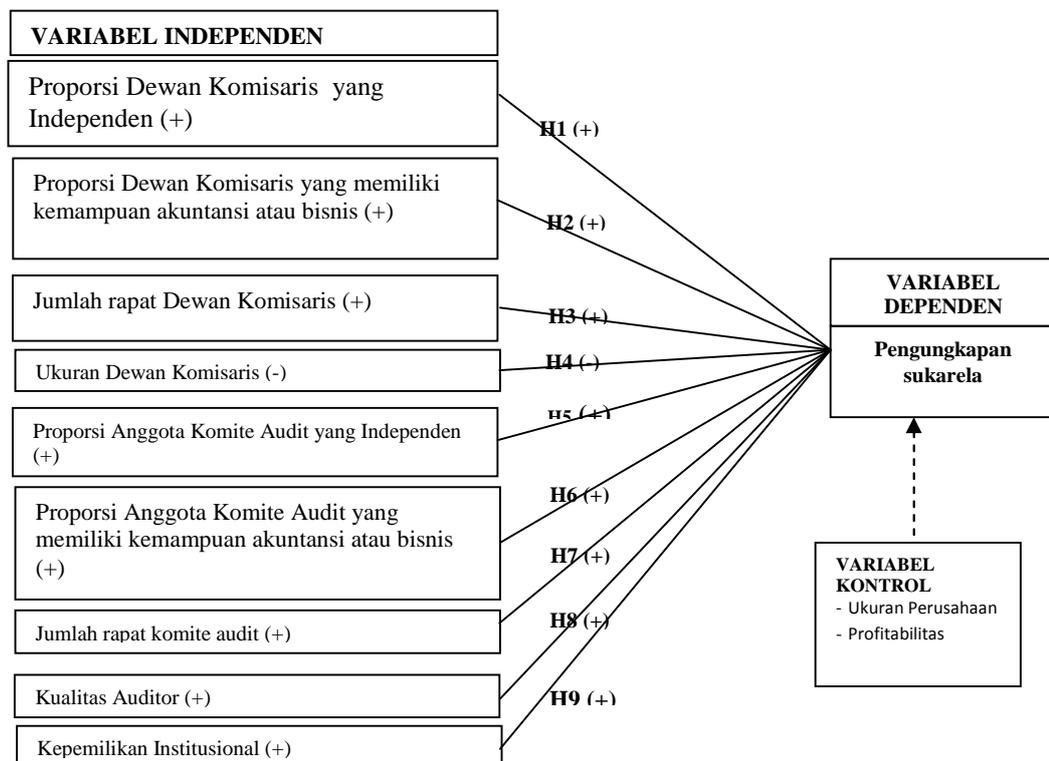
¹ Corresponding author

Corporate Governance yang baik, maka kualitas pengungkapan sukarela perusahaan menjadi lebih baik.

Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh seperangkat mekanisme *Corporate Governance* yang meliputi proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela di perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, dan kepemilikan institusional dapat mencerminkan tingkat independensi, kemampuan, dan kualitas dari pengawasan manajemen perusahaan. Proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, dan kualitas auditor dapat mencerminkan tingkat kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan teori *agency* diharapkan proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, dan kualitas auditor dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela.

Sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*) bila ukuran dewan komisaris suatu perusahaan ukurannya besar, maka akan memiliki kemampuan yang lebih dalam pengungkapan. Akan tetapi dewan komisaris akan lebih mudah dikendalikan oleh lingkungan eksternal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada objektivitas kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengungkapan sukarela, karena dewan komisaris akan cenderung membatasi pengungkapan sukarela demi kepentingan perusahaan daripada pemegang saham. Oleh karena itu,

perlu meningkatkan pengawasan dan pengontrolan diantara dewan komisaris dengan cara mengurangi jumlah dewan komisaris. Dengan sedikitnya jumlah dewan dapat meningkatkan pengawasan dan pengontrolan sehingga dewan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela untuk kepentingan pemegang saham.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris yang Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan teori agensi dengan memiliki dewan komisaris yang independen akan memiliki kekuatan lebih besar dalam memonitor manajemen untuk mengungkapkan informasi. Beberapa studi empiris telah menguji hubungan antara dewan komisaris yang independen dan pengungkapan sukarela dan menghasilkan hubungan yang positif (contoh Arifin, 2001; Ayu K, 2013; Chen dan Janggi, 2000; Arcay dan Vazquez, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hipotesis berikut:

H1: Proporsi dewan komisaris yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis terhadap Pengungkapan Sukarela

Kemampuan akuntansi atau bisnis yang dimiliki oleh dewan komisaris digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Karena dengan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sistem pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan sehingga perusahaan dapat menyajikan pengungkapan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan. Hipotesis penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Nuryaman (2010). Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Dari perspektif teori keagenan, frekuensi pertemuan dapat dipandang sebagai proksi waktu yang digunakan dewan untuk melaksanakan tugas dan tingkat kegiatan monitoring mereka (Laksamana, 2008). Kegiatan rapat akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Oleh karena itu dengan semakin sering dewan komisaris melaksanakan rapat dapat diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini telah didukung oleh hasil penelitian Septiani (2011) dan Ahmad (2012). Dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya bila ukuran dewan komisaris suatu perusahaan ukurannya besar, maka akan memiliki kemampuan yang lebih dalam pengungkapan. Akan tetapi dewan komisaris akan lebih mudah dikendalikan oleh lingkungan eksternal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada objektivitas kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengungkapan sukarela, karena dewan komisaris akan cenderung membatasi pengungkapan sukarela demi kepentingan perusahaan daripada pemegang saham. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengontrolan diantara dewan komisaris dengan cara mengurangi jumlah dewan komisaris. Dengan sedikitnya jumlah dewan dapat meningkatkan pengawasan dan pengontrolan sehingga dewan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela untuk kepentingan pemegang saham. Pendapat tentang kecilnya ukuran dewan komisaris didukung oleh beberapa komite dan laporan tentang praktik tata kelola perusahaan di seluruh dunia, dimana hal ini juga direkomendasikan dalam laporan Hampel (1998). Dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Proporsi Komite Audit yang Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Karakteristik yang paling penting dari komite audit adalah adanya mayoritas komite audit yang independen agar menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dan tidak memihak siapapun baik manajer, pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Dengan semakin banyaknya komite audit yang independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan khususnya dalam hal menyajikan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Meningkatnya pengawasan akan meminimalisir kemungkinan manipulasi dan pembatasan dalam pengungkapan sehingga pengungkapan sukarela perusahaan dapat meningkat. Dalam penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara keberadaan komite audit dan pengungkapan sukarela (Ho & Wong, 2001). Dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 : Proporsi komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Proporsi Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis terhadap Pengungkapan Sukarela

Karakteristik yang paling penting dari komite audit adalah adanya komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau bisnis agar menjaga hasil kualitas audit karena komite audit bekerja secara obyektif dengan kemampuan yang profesional dan memadai. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis akan lebih memahami jalannya proses pengungkapan dan hal-hal yang perlu diungkapkan oleh perusahaan daripada komite audit yang tidak memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis. Semakin banyak anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis akan semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap pengungkapan sehingga komite audit akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengungkapan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Komite audit yang memahami proses pengungkapan akan mengidentifikasi hal-hal mencurigakan berkaitan dengan pengungkapan dan dapat meminimalisasi pembatasan pengungkapan karena komite audit mengetahui hal-hal yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dan pengungkapan sukarela adalah Kent, *et al.* (2010) dan Akhtaruddin & Haron (2010), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggota agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan (Wulan, 2013). Frekuensi rapat yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat koordinasi, tingkat pengawasan, dan pengendalian dan berdampak pada meningkatnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Wulan (2013) menunjukkan adanya pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan. Sesuai dengan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Pengungkapan Sukarela

Kualitas auditor didefinisikan sebagai probabilitas gabungan mendeteksi dan melaporkan material kesalahan laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Dengan demikian kualitas auditor yang baik, maka akan menghasilkan informasi yang baik. Teori keagenan memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas auditor karena sebuah kantor akuntan publik yang besar dan independen memiliki kemampuan yang lebih dalam menangani masalah keagenan dengan menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Beberapa penelitian yang meneliti hubungan dari kantor akuntan publik yang besar dengan kualitas pelaporan keuangan seperti Nuryaman (2009) dan Barros, *et al.* (2013) menemukan adanya hubungan positif antara kantor akuntan publik yang menjadi 4 besar dengan pengungkapan sukarela. Dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H8: Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih institusi (lembaga). Institusi atau lembaga di sini dapat berupa bank, perusahaan investasi, ataupun perusahaan lainnya. Adanya kepemilikan oleh institusi (lembaga) akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar tidak menyimpang dan bekerja sesuai kepentingan para pemegang saham. Berdasarkan teori agensi jika kepemilikan institusional yang memiliki proporsi saham yang lebih besar akan dapat mendesak para manajer dan direktur untuk melakukan pengungkapan baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela. Penelitian Ayu K (2013) menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H9: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan dikotomis yaitu dengan 1 bila diungkapkan dan 0 bila tidak diungkapkan. Pengukuran variabel dependen memadukan tiga sumber daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan oleh Sehar, *et al.* (2013), Darmadi dan Sodikin (2013), dan Anyta (2011) yang telah disesuaikan dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor KEP-431/BL/2012. Jumlah item yang digunakan dalam penelitian ada 25 item dengan 11 kategori. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan) yang terdiri dari proporsi dewan komisaris yang independen (DKI), proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPPDK), jumlah rapat dewan komisaris (RPTDK), ukuran dewan komisaris (UD), proporsi komite audit yang independen (KAUDI), proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD), jumlah rapat komite audit (RPTAUD), kualitas auditor (KA) dan kepemilikan institusional (KI). Proporsi dewan komisaris yang independen (DKI) diukur dengan persentase jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPPDK) dapat diukur dengan persentase jumlah dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Jumlah rapat dewan komisaris (RPTDK) dapat diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan dewan komisaris perusahaan selama satu tahun. Ukuran dewan komisaris (UD) diukur menggunakan jumlah total anggota dewan komisaris yang berada di dalam perusahaan. Proporsi anggota komite audit yang independen (KAUDI) diukur persentase dengan jumlah komite audit yang independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit. Proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) diukur dengan persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dibagi dengan jumlah total anggota komite audit. Jumlah rapat komite audit (RPTAUD) dapat diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan komite audit perusahaan selama satu tahun. Pengukuran kualitas auditor (KA) diukur menggunakan variabel dummy jika 1 perusahaan diaudit oleh kantor akuntan public yang menjadi 4 besar di Indonesia dan 0 lainnya. Pengukuran kepemilikan institusional (KI) dalam penelitian ini adalah persentase ekuitas saham yang dimiliki oleh institusi dan/atau lembaga lain. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (UP) dan Profitabilitas (ROE). Ukuran (UP) perusahaan diukur dengan total aktiva yang diubah dalam bentuk logaritma. Profitabilitas (ROE) diukur dengan rasio laba bersih terhadap total ekuitas perusahaan.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun buku 2010-2013. Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang

menjadi perhatian. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur.
2. Terdaftar di BEI dalam list *fact book* 2010 dan mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2010- 2013.
3. Laporan tahunan yang mengungkapkan informasi lengkap mengenai riwayat pendidikan dewan komisaris dan komite audit.
4. Laporan tahunan yang mengungkapkan informasi lengkap mengenai jumlah rapat secara nominal dewan komisaris dan komite audit.
5. Laporan keuangan yang menggunakan nilai rupiah.
6. Adanya distribusi *unstandardized data* normal. Hal ini berarti, data yang tidak normal dan menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria tersebut harus dikeluarkan dari sampel, karena syarat berlakunya model adalah terpenuhinya kriteria tersebut.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$VD = \beta_0 + \beta_1DKI + \beta_2KEMPAUD + \beta_3RPTDK + \beta_4UD + \beta_5KAUDI + \beta_6KEMPAUD + \beta_7RPTAUD + \beta_8KA + \beta_9KI + \beta_{10}UP + \beta_{11}ROE + \varepsilon$$

VD	: Pengungkapan sukarela
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{11}$: Koefisien regresi
DKI	: Dewan komisaris yang independen
KEMPAUD	: Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis
RPTDK	: Jumlah rapat dewan komisaris
UD	: Ukuran dewan komisaris
KAUDI	: Komite audit yang independen
KEMPAUD	: Komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis
RPTAUD	: Jumlah rapat komite audit
KA	: Kualitas auditor
KI	: Kepemilikan institusional
UP	: Ukuran perusahaan
ROE	: Profitabilitas
	: Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi lengkap mengenai jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit secara nominal dikecualikan dari populasi penelitian karena tidak dapat memenuhi pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Selain itu perusahaan yang tidak mengungkapkan secara lengkap mengenai riwayat pendidikan dewan komisaris dan komite audit juga tidak dimasukkan ke dalam populasi penelitian. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan memilih perusahaan secara acak dan cermat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian agar relevan.

Tabel 1
Data Sampel Penelitian

NO	DATA SAMPEL	JUMLAH
1	Perusahaan manufaktur dalam list <i>fact book</i> 2010	130
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan nilai rupiah dalam laporan keuangan	(23)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan data rapat dan pendidikan dewan komisaris dan komite audit secara lengkap	(49)
4	Perusahaan yang laporan tahunannya tidak dapat diperoleh dari tahun 2010 sampai 2013	(15)
JUMLAH SAMPEL YANG DITELITI		43
OUTLIER		(3)
JUMLAH SAMPEL		40
JUMLAH TOTAL SAMPEL SELAMA 4 TAHUN		160

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
VD	160	0,12	0,80	0,36425	0,154796
DKI	160	0,25	0,75	0,39540	0,100480
KEMPPDK	160	0,20	1	0,50080	0,206340
RPTDK	160	1	24	4,70	3,52
UD	160	2	11	4,47	2,098
KAUDI	160	0,50	1	0,9546	0,120830
KEMPAUD	160	0,25	1	0,7654	0,245140
RPTAUD	160	1	44	7,65	7,636
KI	160	0	0,9996	0,703115	0,204128
UP	160	25,1769	32,997	28,1495	1,709963
ROE	160	-3,2454	0,4957	0,112018	0,310427
Valid N (listwise)	160				

Tabel 2
Statistik Deskriptif
KA

	Frekuensi	Persen	Valid Percent	Persen kumulatif
Valid	0	84	52,5	52,5
	1	76	47,5	100
Total	160	100	100	

- Keterangan :
- VD : Jumlah persentase pengungkapan sukarela perusahaan
 - DKI : Jumlah proporsi dewan komisaris yang independen di perusahaan
 - KEMPPDK : Jumlah proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis
 - RPTDK : Jumlah rapat dewan komisaris selama satu tahun
 - UD : Jumlah dewan komisaris perusahaan

KAUDI	: Jumlah proporsi komite audit yang independen di perusahaan
KEMPAUD	: Jumlah proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis
RPTAUD	: Jumlah rapat komite audit selama satu tahun
KA	: Kualitas auditor perusahaan
KI	: Kepemilikan Institusional
UP	: Ukuran Perusahaan
ROE	: Profitabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa N atau jumlah total data setiap variabel adalah 160 buah selama periode 2010-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah persentase pengungkapan sukarela. Variabel pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* (VD) memiliki nilai terendah yaitu 0,12 dan nilai tertinggi yaitu 0,80. Rata-rata pengungkapan sukarela sebesar 0,36425 dan standar deviasinya sebesar 0,154796. Variabel proporsi dewan komisaris yang independen (DKI) memiliki nilai terendah sebesar 0,25 dan nilai tertinggi sebesar 0,75. Rata-rata proporsi dewan komisaris yang independen sebesar 0,39540 dan standar deviasinya sebesar 0,100480. Variabel proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) memiliki nilai terendah sebesar 0,2 sedangkan nilai tertinggi sebesar 1. Rata-rata proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis sebesar 0,50080 dan standar deviasinya sebesar 0,206340. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (RPTDK) memiliki nilai terendah sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 24. Rata-rata jumlah rapat dewan komisaris sebesar 4,7 dan standar deviasinya sebesar 3,52. Variabel ukuran dewan komisaris (UD) memiliki nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 11. Rata-rata variabel ukuran dewan komisaris sebesar 4,47 dan standar deviasinya sebesar 2,098. Variabel proporsi komite audit yang independen (KAUDI) memiliki nilai terendah sebesar 0,5 dan nilai tertinggi sebesar 1. Rata-rata variabel proporsi komite audit yang independen sebesar 0,9546 dan standar deviasinya sebesar 0,120830. Variabel proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) memiliki nilai terendah sebesar 0,25 dan nilai tertinggi sebesar 1. Rata-rata proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis sebesar 0,7654 dan standar deviasinya sebesar 0,245240. Variabel jumlah rapat komite audit (RPTAUD) memiliki nilai terendah sebesar 1 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 44. Rata-rata jumlah rapat komite audit yaitu 7,65 dan standar deviasinya sebesar 7,636. Variabel kualitas auditor (KA) merupakan variabel independen yang menggambarkan kualitas audit perusahaan. Variabel ini menggunakan pengukuran variabel *dummy*, sehingga masing-masing variabel memiliki nilai minimum 0, dan nilai tertinggi 1 pada setiap tahun 2010-2013 yang dijadikan sampel penelitian. Tabel 3 menunjukkan bahwa 52,5% perusahaan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar dalam empat besar di Indonesia dan 47,5% perusahaan telah menggunakan jasa akuntan publik yang termasuk dalam *big four* di Indonesia. Variabel kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 0,9996. Rata-rata kepemilikan Institusional sebesar 0,703115 dan standar deviasinya sebesar 0,204128.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan nilai *kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,811 dan tingkat signifikansi sebesar 0,526. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolonieritas menunjukkan tidak ada variabel independen yang nilai *tolerance* kurang dari 0,05 dan nilai VIF seluruhnya berada dibawah 10 berarti tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,921 lebih besar daripada *dU* sebesar 1,8899. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tingkat signifikansi semua variabel di atas 5% atau 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pada tabel 3 terlihat bahwa ada 5 variabel independen yaitu dewan dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPPDK), ukuran dewan komisaris (UD), jumlah rapat komite audit (RPTAUD), kualitas auditor (KA), dan kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela yaitu dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,579; 0,060; 0,317; 0,607; 0,143 (karena lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% atau 0,05). Sedangkan variabel independen komisaris independen (DKI), jumlah rapat dewan komisaris (RPTDK), komite audit yang independen (KAUDI), dan komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela, dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,021; 0,003; 0,003; 0,013 (lebih kecil dari 5% atau 0,05). Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil dari tabel 3:

Tabel 3
Uji Signifikan Parameter Individual

Model	t	Nilai Signifikansi (0,05)
1 (Constant)	-0,922	0,358
DKI	-2,328	0,021*
KEMPPDK	-0,556	0,579
RPTDK	3,071	0,003*
UD	1,898	0,060
KAUDI	-3,046	0,003*
KEMPAUD	-2,526	0,013*
RPTAUD	-1,005	0,317
KA	-0,515	0,607
KI	1,473	0,143
UP	3,509	0,001*
ROE	2,950	0,004*

Keterangan :*) Signifikan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris yang independen (DKI) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris yang independen (DKI) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela (VD) sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arifin (2001), Ayu K (2013), Chen dan Janggi (2000), dan Arcay & Vazquez (2005). Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang kuat dari dewan komisaris atau direksi yang memiliki kekuasaan, sehingga mempengaruhi keputusan dewan komisaris yang independen.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPPDK) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,579. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Aniroh (2013). Bertambahnya pengetahuan dewan komisaris akan akuntansi atau bisnis terkadang akan menghambat pengungkapan sukarela karena informasi-informasi keuangan dan non keuangan yang dianggap merugikan perusahaan tidak akan diungkapkan. Untuk meningkatkan pengungkapan sukarela, dewan komisaris tidak harus memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang keuangan atau pernah bekerja di bidang akuntansi atau bisnis. Pendidikan informal yang diikuti dengan pelatihan keuangan atau diskusi dan pemahaman yang jelas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi pengungkapan sukarela sudah cukup membuat dewan komisaris dapat meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris (RPTDK) memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 3 (H3). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiani (2011) dan Ahmad (2012). Sesuai dengan teori keagenan yang menyebutkan bahwa semakin meningkat jumlah rapat dewan komisaris, maka tingkat pengawasan terhadap kinerja manajer terhadap pengungkapan sukarela juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pengawasan akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris (UD) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,060. Hasil olahan data tidak sejalan dengan penelitian Vafeas (2000) dan Ahmad (2012) tetapi sejalan dengan penelitian Nuryaman (2010) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran dewan komisaris (UD) terhadap pengungkapan sukarela (VD). Banyak sedikitnya dewan komisaris tidak menjamin adanya mekanisme pengawasan internal yang lebih baik terkait dengan pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel proporsi komite audit yang independen (KAUDI) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 5 (H5) yang menyatakan bahwa proporsi komite audit yang independen (KAUDI) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela (VD) sehingga H5 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ho dan Wong (2001). Hasil penelitian ini berbeda karena adanya kinerja yang tidak baik dari seluruh komite audit yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Mujiono, 2004).

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,013. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 6 (H6) yang menyatakan bahwa proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPAUD) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela (VD) sehingga H6 ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin & Haron (2010). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meningkatnya jumlah komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis tidak selalu meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan banyaknya komite audit yang paham akan akuntansi atau bisnis akan meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian komite audit dalam mengungkapkan sesuatu yang berakibat akan membatasi pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit (RPTAUD) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,317. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wulan (2013) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisham, *et al.* (2014). Penelitian ini memiliki hasil olahan yang berbeda karena ketidakefisienan keberadaan rapat seperti kurang efektifnya rapat-rapat yang dilakukan komite audit.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor (KA) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,607. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuryaman (2009) dan Barros, *et al.* (2013) tetapi sejalan dengan penelitian Wibowo (2012). Penyebab utama ketidakberhasilan penelitian ini adalah kantor akuntan publik (KAP) Indonesia hanya mengaudit laporan keuangan perusahaan bukan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan bahwa hipotesis kesembilan ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan insitutional (KI) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi sebesar 0,143. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ayu K (2013) tetapi sejalan dengan penelitian Sari



(2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena adanya suara yang mendominasi sehingga membatasi pengungkapan sukarela, pihak institusi sebagai pemegang saham mayoritas menganggap pengungkapan sukarela bukan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, dimungkinkan oleh pemegang saham institusi yang menjadi hal yang wajib dilaporkan hanya laporan keuangan saja sebagai pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel jumlah rapat dewan komisaris yang mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel lainnya sesuai dengan hipotesis. Variabel proporsi dewan komisaris yang independen, jumlah proporsi komite audit yang independen, dan proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela, tetapi memiliki arah negatif sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis. Variabel proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama* Sampel penelitian ini hanya menganalisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 sebagai sampel penelitian sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan-perusahaan di sektor lain. *Kedua* Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan sukarela. *Ketiga* Penilaian pengungkapan sukarela yang dilakukan peneliti tanpa memberikan bobot/nilai yang lebih rinci.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan jenis perusahaan yang berbeda sebagai pembanding dan menggunakan periode penelitian lebih dari 4 tahun agar hasil penelitian lebih akurat. *Kedua* penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian. *Ketiga* Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel *corporate governance* lainnya seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan anggota keluarga dewan direksi. *Keempat* penelitian selanjutnya menggunakan item-item pengungkapan sukarela lebih terkini yang berlaku untuk perusahaan *go public* di Indonesia. *Kelima* penelitian selanjutnya dapat memberikan bobot/nilai dalam mengukur indeks pengungkapan sukarela agar hasil penelitian lebih akurat.

REFERENSI

- Achmad, Tarmizi. 2012. "Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?." *Jurnal keuangan dan Perbankan*.16, (1), 1-12.
- Akhtaruddin, M., & Haron, H. 2010."Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures".*Asian Review of Accounting*. 18, (3), 245-259.
- Al-Janadi, Yaseen *et al*, 2013 "*Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure I in Saudi Arabia*", *Research Journal of Finance and Accounting*,4 , (4), 1-12.
- Aniroh, Sulung. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Anyta.2011. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Voluntary Corporate Governance Disclosure.*Skripsi*.Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arcaay, Rosario Babio, & Vazquez, Flora Muino. 2005. "Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain". *Advances in Accounting*.21, 299-331.
- Arifin, D.N. Ibrahim, and H. Haron, 2001. "The Impact of the Board of Director's Composition, Audit Committee and Firm Size on the Level of Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Jakarta Stock Exchange". *Proceeding For The Fourth Annual Malaysian Finance Association Symposium, 31st May-1st June 2002*.



- Ayu K, Andini. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Barros, Carlos P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. 2013. "Corporate Governance And Voluntary Disclosure In France". *Journal of Applied Business Research*. 29(2), 561-678.
- Chariri, anis dan Ghozali, imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chen, C.J. & Jaggi, B. 2000. "Association between Independent Nonexecutive Directors, Family Kontrol and Financial Disclosures in Hong Kong". *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4-5):285-310.
- Daniri, Mas Ahmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.
- Darmadi, Salim & Sodikin, Achmad. 2013. "Information disclosure by family-controlled firms ". *Asian Review of Accounting*. 21, (3), 223 – 240.
- Darrough, M.N. 1993. "Disclosure Policy and Competition: Courtnot vs Bertrand", *The Accounting Review*, Vol.68 No.3, pp. 534-561.
- DeAngelo, Linda Elizabeth. 1981. "Auditor Size and Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics*, 3, 183-199.
- Emerson, R. M. 1962. Power – Dependence Relations. *American Sociological Review*. 27, 692-703.
- Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta: Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*, Edisi 5 Cetakan V. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Hampel Report. 1988. "Committee on Corporate Governance: Final Report". London.
- Hisham et al. 2014. "The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure". International Conference on Accounting Studies 2014. ICAS 2014. 18-19 August 2014. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ho, Simon S. M., & Wong, Kar Shun. 2001. "A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure". *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, 10(2), 139-156.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. 1976. "Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure". *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khan, Ifraz, Priyashni, Vandana, dan Arvind, Patel. 2013. "The impact of ownership structure on voluntary corporate disclosure in annual".
- Laksamana, I. 2008. "Corporate Board Governance and Voluntary Disclosure of Executive Compensation Practices". *Contemporary Accounting Research*. 25, (4), 1147-82.
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. 1992. "A modest proposal for improved corporate governance". *Business Lawyer*, 1(1), 59-77.
- Miteva, E. (2005). *Improving Corporate Governance in the Middle East and North Africa*. Paper presented at the MENA and OECD's Initiative on Governance for Investment and Development' MENA Regional Corporate Governance Forum, Amman, Jordan.
- Mujiono. 2004. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta). *Tesis*. Program Studi Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muntoro, R.K. 2006. "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif". *Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Naser, Kamal, & Nuseibeh, Rana. 2003. "Quality of Financial Reporting: Evidence From the Listed Saudi Nonfinancial Companies". *The International Journal of Accounting*, 38, (1), 41-69.
- Ismoyowati, Nurbuana Tunjung. 2011. Pengaruh Indeks *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Dan Dewan Komisaris, Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela



- Dalam Laporan Tahunan (Studi Kasus Pada Perusahaan *Go Public* Di Indonesia Tahun 2003-2007). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nuryaman. 2009. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sukarela". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.6, (1), 89-116.
- Nuryaman. 2010. The effect of Characteristics of Commisioner Board, Industry Specialize Audit Firm on Earnings Management and voluntary disclosure : Evidence from Indonesia. The 3 rd International Accounting Conference. Indonesia University.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta.
- Persons, O. S. 2009. "Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms". *International Journal of Disclosure and Governance*. 6(4), 284-297.
- Pfeffer, Jeffrey. 1972. "Merger as a response to organizational interdependence". *Administrative Science Quarterly*, 17(3), 382-394.
- Pfeffer, Jeffrey. dan G.R. Salancik. 1978. "The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective". New York: Harper & Row.
- Sari, Florentina Widita. 2012. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008 – 2011). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sehar, Najm-Ul, et al. 2013. "Determinants of Voluntary Disclosure in Annual Report: A Case Study of Pakistan". *Management and Administrative Sciences Review* ISSN: 2308-1368. 2, (2), 181-195.
- Septiani, Aditya. 2011. Analisis Dewan Komisaris Komite Audit Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*). *Laporan Akhir Kegiatan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Lana Sularto, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*", Proceeding PESAT Gunadarma. Vol 2, 2007.
- Syakhroza, Akhmad. (2002). Mekanisme Pengendalian Internal dalam Melakukan Assessment terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jurnal Usahawan*. XXXI, (08), Agustus, 41 -52.
- Tjager, I Nyoman et al. 2003. *Corporate Governance*. Jakarta : PT Prenhallindo.
- Tri Wibowo. 2012. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Komposisi Dewan Komisaris, dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Vafeas, Nikos. 2000. "Board structure and the informativeness of earnings". *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(2), 139-160.
- Wulan, Sari. 2013. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Disclosure". Kertas Kerja. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Yermack, D. 1996. "High market valuation of companies with a small board of directors". *Journal of Financial Economics*, 40, 185-211.
- Yunita, Ririk. 2011. "Pengaruh Ownership Retention, Reputasi Underwriter, Umur dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital dalam Prospektus IPO dengan Proprietary Cost sebagai Variabel Moderasi". *Tesis* Program Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Yunita, Nancy. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Voluntary Disclosure dan Biaya Hutang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol 1 No 1, 2012.